

ANALISIS KRITIS TERHADAP PEMBANGUNAN DUNIA KETIGA DAN TRANSFORMASI AGRARIA DI INDONESIA

Oleh:

NUR UTAMININGSIH

(Alumni Departemen Hubungan Internasional Fisip Universitas Hasanuddin)

Email: utaminingsih289@gmail.com

Abstract

This article discusses a critical investigation of the topic of Third World development and the issue of agrarian transformation in Indonesia. This study uses a qualitative methodology with an in-depth interpretation tracing model of each research component. The Capitalist Block's power / knowledge has been successfully distributed locally in Third World Countries through the Development Project. The local distribution of power / knowledge through the mechanism of creating abnormalities and the formation of the development apparatus plays a role in translating the basic values of capitalism in Indonesia. Agrarian transformation has become one of the social realities of the successful existence of capitalism in the development of Indonesia as a third world country. The meaning of Indonesia as an agrarian country towards agrarian (earth, water, sea, space, and human society, as regulated in UUPA 1960) is increasingly result-oriented through industrialization and commercialization. Agrarian economy morals in Indonesia prioritize control, ownership and use of "land for development."

Keywords: *Third World Development, Agrarian Transformation, Power / Knowledge*

Abstrak

Artikel ini membahas mengenai penelusuran kritis terhadap topik pembangunan Dunia Ketiga dan isu transformasi agraria di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan model penelusuran interpretasi mendalam dari setiap komponen penelitian. *Power/knowledge* Blok Kapitalis berhasil didistribusikan secara lokal di Negara Dunia Ketiga melalui Proyek Pembangunan. Distribusi lokal *power/knowledge* melalui mekanisme penciptaan abnormalitas dan pembentukan aparat pembangunan, berperan menerjemahkan nilai dasar Kapitalisme di Indonesia. Transformasi Agraria menjadi salah satu realitas sosial atas keberhasilan eksistensi Kapitalisme dalam Pembangunan Indonesia sebagai Negara Dunia Ketiga. Pemaknaan Indonesia sebagai negara agraris terhadap agraria (bumi, air, laut, ruang angkasa, dan masyarakat manusia, sebagaimana diatur dalam UUPA 1960) semakin berorientasi hasil melalui industrialisasi dan komersialisasi. Moral ekonomi agraria di Indonesia lebih mengutamakan penguasaan, kepemilikan dan pemanfaatan "tanah untuk Pembangunan."

Kata Kunci: Pembangunan Dunia Ketiga, Transformasi Agraria, *Power/Knowledge*

PENDAHULUAN

Rezim pembangunan mengantar dunia pada era Globalisasi. Empat dekade terakhir rezim¹ internasional abad ke-20 yang merujuk pada perubahan-perubahan signifikan yang terjadi di dunia sering dipahami sebagai globalisasi (Scholte, 1997b, p. 14). Perkembangan progresif masyarakat dan politik yang seragam dan menyatu membawa semangat fragmentasi dan unifikasi (Held, 1997, p. 92). Scholte (1997a, p. 430) menggambarkan perkembangan tersebut dari perubahan signifikan atas peningkatan hubungan batas wilayah (*cross border relations*), peningkatan dalam hubungan keterbukaan wilayah (*open border relations*) dan peningkatan dalam hubungan perubahan wilayah (*trans border relations*). Hampir seluruh sektor menjadi sasaran globalisasi.

Blok Kapitalis berusaha mengontrol rezim internasional melalui wacana proyek pembangunan. Transformasi agraria menjadi salah satu realitas sosial di Negara Dunia Ketiga. Tradisi masyarakat agraris yang dianggap kuno didorong menuju sistem yang lebih modern. Keterbelakangan selalu identik dengan petani dalam statusnya sebagai masyarakat pedesaan. Oleh karena itu, masyarakat perkotaan dan segala kultur modernnya selalu dijadikan contoh untuk maju.

Sejak tahun 1870 hingga 1942, sistem agraria dalam formasi sosial kapitalisme kolonial sudah terbentuk mapan dalam *Agrarische Wet* pemerintah Hindia Belanda. Prioritas hak pemanfaatan tanah pada perusahaan asing dan mobilisasi buruh perkebunan secara paksa menjadi karakter produksi komoditas ekspor kolonial, yang sebagian besar berupa gula, karet, dan kopi. Eksploitasi diwujudkan melalui alokasi besar atas surplus ke pihak Hindia Belanda di pusat Belanda (Gordon, 2010).

Lepas dari rezim kolonial, Indonesia sadar akan pentingnya revolusi agraria untuk membangun fondasi negara yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sistem agraria nasional coba dirumuskan untuk mengakhiri eksploitasi lahan dan ketidak-adilan dalam distribusi tanah, misalnya dalam sistem dualisme antara pemilik tanah dan buruh tani dari warisan rezim penjajahan. Kepastian hukum tentang hak-hak atas tanah juga merupakan tujuan dasar dari program reforma agraria di awal dekade '60-an (Soemardjan, 1984, p. 103-106). Sistem agraria nasional Indonesia mulai menunjukkan manajemen yang sistematis sejak program redistribusi tanah berlebih dan rekonstruksi struktural agraria warisan kolonial secara resmi mulai dilaksanakan pada September 1960.

Sayang sekali, maksimalisasi penerapan ide reforma agraria terusik oleh tragedi G30S pada 1965. Sebagian besar korban dalam tragedi itu adalah petani kecil di pedesaan. Pada masa itu, Orde Baru memegang kendali dalam

¹ Rezim dimaksudkan pada keadaan yang menggambarkan kapital (modal) sebagai suatu formasi sosial dimana akumulasinya (senantiasa) menjadi basis pengaturan kehidupan sosio-politis (Heilbroner, 1991, p. 99).

transformasi kekuasaan yang ditandai dengan diangkatnya Soeharto sebagai Presiden RI pada tahun 1968. Kepemimpinan Orde Baru tersebut pada dasarnya seiring dengan naiknya rezim Developmentalis-Militeristik di Indonesia (Setiawan, 2003). Ide reforma agraria yang bertujuan untuk merubah warisan struktural agraria era kolonialisme, baik dalam agenda kebijakan domestik maupun tindakan politik luar negeri Indonesia, tidak pernah lagi terdengar. Yang populer dan muncul sebagai satu-satunya pilihan adalah ide pembangunan Dunia Ketiga yang memosisikan agraria dalam berbagai penyesuaian terhadap rezim internasional dan diwacanakan melalui proyek pembangunan Dunia Ketiga.

Indonesia sudah merdeka selama 69 tahun, memiliki potensi agraria yang melimpah, tetapi menempati urutan indeks ketahanan pangan dalam level yang masih rentan, tepatnya ke-72 dari 109 negara yang didata. Jauh di bawah Malaysia (34), China (42), Thailand (49), Filipina (65) dan Vietnam (67) (*The Economist Intelligence Unit, The Economist Group*, Mei 2014). Oleh karena itu, merupakan hal yang wajar jika menyebut Indonesia masih dan sedang rentan untuk isu pangan dan pertanian. Agus Pambudi (2014) mencatat bahwa 78% pasar benih Indonesia dikuasai oleh beberapa perusahaan asing, di mana dua dari perusahaan-perusahaan tersebut berhasil menguasai sekitar 67% pasar benih Indonesia.²

Karakter 'kota besar'³ pada abad ke-16 identik pada kota dengan penduduk banyak dan menetap. Penduduk menetap merupakan karakter dari masyarakat agraris yang umumnya beraktivitas sebagai petani (Diamond, 2013, p. 99-102). Karakter superioritas tersebut, khususnya bagi masyarakat agraris di Asia, berubah dalam rezim internasional abad ke-21. Masyarakat agraris, termasuk Indonesia, jadi lebih identik dengan pertanian, pedesaan, dan kemiskinan. Bappenas mencatat bahwa 72% dari 40% penduduk Indonesia berpendapatan rendah memiliki keterkaitan dengan desa. Selain itu, 63% dari 28,6 juta penduduk miskin Indonesia tinggal di desa (Presentasi Lokakarya INFID, "Ketimpangan dan Arah Pembangunan Nasional dan Internasional," Rahmah Iryanti, Bappenas Indonesia, 3 Maret 2015).⁴ Desa dan pertanian memiliki porsi besar dalam realitas kemiskinan masyarakat, tetapi hanya mampu memberi kontribusi sebesar 15% bagi PDB Indonesia.⁵

² Dikutip dari data Agus Pambudi, Fakultas Ekonomi UI, dua perusahaan asing yang dimaksud adalah PT Bisi Internasional (TNC+PMDN) dan PT East West Seed Indonesia (TNC) (Ichlas, 2014).

³ Kota Besar merupakan istilah bagi wilayah yang sudah mengatur pembangunannya dengan kultur lokal yang teknis, ekonomis, dan lebih superior dari Eropa pada era pra-kolonial (Frank, 1998). Indonesia menjadi salah satu kota besar dengan segala keteraturannya yang sudah mengenal budaya produksi pangan sejak tahun 2500 SM (Diamond, 2013).

⁴ Dalam presentasi, data ini diolah Bappenas dari Sensus Pertanian 2013.

⁵ Ini merupakan argumen Bappenas yang diolah dari Sakernas dan data Pendapatan Nasional

Sektor pertanian dan masyarakat Indonesia sebagai negara agraris semakin lama dianggap semakin tidak produktif. Revolusi menuju “Sosialisme Indonesia” dengan alat reformasi agraria yang tetap menghargai hukum masing-masing wilayah adat menjadi fondasi efektif sistem agraria Indonesia pasca-kolonial. Namun, Revolusi Sosialisme Indonesia bertransformasi menjadi aset investasi penyuksesan pembangunan nasional hingga ke tingkat lokal sejak rezim Orde Baru.

Agraria Indonesia semakin diselimuti perang kepentingan terselubung dalam proyek pembangunan. Profit merupakan tujuan utama dari wacana proyek pembangunan, di mana praktik proletarisasi buruh tani, eksploitasi lahan, dan kampanye ketahanan pangan menjadi diskursus hegemoni Blok Kapitalis yang tidak disadari dalam dinamika transnasional. Indonesia, sebagai negara agraris, dengan potensi sumberdaya alam dan manusia yang menguntungkan ternyata menggambarkan kecenderungan yang semakin pro-kapitalis dengan realita kemiskinan yang bertahun-tahun belum juga terselesaikan oleh proyek pembangunan Dunia Ketiga. Kemiskinan masih menjadi masalah utama pembangunan untuk agraria yang telah diupayakan sejak setengah abad yang lalu di Indonesia. Kegelisahan tersebut memicu pertanyaan utama dalam penelitian ini, yaitu: ***mengapa model produksi kapitalis berhasil eksis dan bertahan dalam wacana proyek pembangunan agraria di Indonesia?*** Realitas sosial atas transformasi agraria yang menunjukkan kecenderungan pro-kapitalis nya dapat membantu menganalisis pertanyaan penelitian tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

Asiatic Mode of Production

Kapitalisme merupakan sejarah sistem ekonomi yang paling brutal dan tidak manusiawi (Avineri, 1969, p.3). Avineri (1969) menyimpulkan kapitalisasi dari penjelasan Marx dalam karyanya, *Economic and Philosophical Manuscripts* (1844) dan *Das Kapital* (1867). Menurutnya, Marx masih sangat berhati-hati dalam mengkaji kapitalisme. Kehati-hatiannya dilatarbelakangi oleh rezim kapitalis yang tengah tumbuh di Eropa. Pemikiran Marx (1818-1883) pun tumbuh pada saat itu. Dalam filsafat historis yang dipahaminya dari Hegel (1770-1831), Marx mengakui bahwa masih dibutuhkannya⁶ peradaban kapitalis menuju *the final salvation*; sosialisme. Model produksi kapitalis merupakan model produksi pertama yang terus dan dengan sendirinya melakukan perluasan ke seluruh dunia dalam bentuk hubungan-hubungan produktif

2013, BPS.

⁶ Masih dibutuhkannya rezim kapitalis selama dianggap masih dapat menciptakan infrastruktur ekonomi dan teknologi yang memungkinkan setiap anggotanya berpeluang mengembangkan dan memberdayakan kapasitasnya masing-masing (Avineri, 1969, p.3.).

(orientasi hasil; industrialisasi).⁷ Ekspansi Eropa ke India, China, Afrika Utara, dan lainnya sekitar abad ke-19 menjadi wilayah pembuktian nyata Marx terhadap universalitas model produksi kapitalis (Avineri, 1968, p. 150-173).

Kelompok “barbar,” “semi-barbar,” “masyarakat petani” dan “*the East* (Timur),” masih sama-sama dikategorikan sebagai masyarakat primitif oleh Marx dalam *the Communist Manifesto* (1848). Karakter masyarakat primitif akan mengalami perubahan sosial menuju sistem kapitalis. Perubahan sosial inilah yang dikenal sebagai asal-usul kapitalisme. Namun, setelah mengeksplorasi Asia sejak 1853, Marx menekankan untuk tidak lagi menggunakan asal-usul kapitalisme Barat yang dikonsepkannya secara umum. Pesan tersebut ditulis dalam karyanya, *A Contribution to the Critique of Political Economy* (1859), dan sebuah surat untuk jurnal sosial Rusia, *Otechestvenniye Zapiski* (1877). Dalam perjalanan penelitiannya, Marx menemukan kekhawatiran bahwa teori pembangunan ekonomi dalam dialektika historis yang selama ini dipahaminya hanya berlaku di Barat saja.

Marx menemukan model produksi Asia (*Asiatic mode of production*), sebuah model produksi yang bersifat statis, tidak berubah, dan benar-benar non-dialektis.⁸ Model produksi ini berdasar pada kepemilikan umum sehingga memberi ruang pada pola *Oriental Despotism*⁹ dalam masyarakat yang stasioner. Perspektif bahwa Asia berbeda dengan Barat” diyakini Marx setelah melihat kondisi dan struktur sosial yang tidak bisa diteliti hanya dengan perspektif dan standarisasi filsafat sejarah Barat saja.

Kendali Blok Kapitalis dalam Rezim Internasional di Asia

Dalam sejarah filsafat Barat, eksistensi komunitas borjuis terdapat dalam feodalisme yang muncul dari perkembangan peradaban masyarakat kuno.¹⁰ Pola produksi kapitalis memberi ruang bagi komunitas borjuis untuk memegang kendali dalam pembangunan ekonomi. Jika tidak terkontrol, semangat untuk terus memperluas kendali (ekspansif) akan beralih sifat jadi eksploitatif dan

⁷ Pahami Marx ini berakar dari teori Hegel (1821) dalam *Philosophy of Right*, “. . . the inner dialectic of civil society thus drives it – or at any rate drives a specific civil society – to push beyond its own limits and seek markets, and so the necessary means of subsistence, in other lands which are either deficient in the goods it has overproduced, or else generally backward in industry, . . .” (Avineri, *Ibid.*, p.2).

⁸ Marx membangun pandangan ini masih dalam perspektif Hegelian, sebagaimana dimuat dalam karyanya Hegel (1956, p.105-106, 116, 139).

⁹ *Oriental despotism* merupakan istilah yang digunakan Marx untuk menggambarkan kondisi sosial masyarakat di India yang dianggap: (1) menyempitkan ruang kreasi dalam berproduksi; (2) memiliki aturan tradisional yang cenderung memperbudak; (3) dan cenderung tidak manusiawi. Meski demikian, konsep *Oriental despotism* Marx yang cukup kritis dan berani tetap diikuti oleh pemakluman sosial. Asia, khususnya India, dianggap sebagai wilayah dengan ritual keagamaan yang masih alami. Bagi Marx, ritual tersebut merupakan ibadah alami yang brutal. Ditulis dalam –*The British Rule in India*|| (NYDT, 25 Juni 1853).

¹⁰ Sesekali, Marx juga menganalogikan masyarakat kuno sebagai masyarakat primitif.

berperan besar terhadap pembangunan kesadaran masyarakat. Masyarakat tergerak untuk melawan sistem feodal dalam sejarah pembangunan ekonomi yang berlaku (Avineri, 1969, p.5-6). Sedangkan di Asia, masyarakat menerima aturan feodal yang berlaku sebagai adat-istiadat. Marx menemukan bahwa pelawanan yang terjadi di Asia (Timur) cenderung diakibatkan oleh penetrasi model produksi kapitalis dan/atau sivilisasi Barat.

Asia sudah dikenal dunia jauh sebelum Marx berkunjung ke India, China maupun Afrika. Sejak abad ke-16, beberapa pemikir Barat telah mengakui beberapa wilayah di Asia sebagai negara yang beradab dengan kultur lokalnya masing-masing (Frank, 1998, p.8). Negara yang beradab dengan kultur lokalnya tersebut dikelompokkan sebagai 'kota-kota besar dunia'¹¹ (oleh O'Brien, 1997; dalam Frank, 1998, p.11-12). Frank (1998) bahkan memperbandingkan Asia sebagai wilayah yang lebih superior dalam mengatur pembangunannya dengan kultur lokal yang teknis dan ekonomis daripada Eropa pada periode pra-kolonialisme.

Edward Said (1978) mengidentifikasi identitas pembangunan dalam studi dan/atau institusi Oriental dalam bukunya berjudul "Orientalism". Dalam argumennya, *Orientalism* diidentifikasi sebagai upaya untuk menandai seluruh dunia, kecuali Barat karena merupakan pelaku atas agenda penandaan tersebut. Sebelumnya, istilah *Orient* sering digunakan Marx untuk menandakan wilayah Timur. Sederhananya, Said sepakat bahwa Eropa berhasil melakukan "penandaan terhadap dunia." Dunia menerima dan juga mengakui hal tersebut sebagai suatu ide yang *oriental*.¹²

Lebih lanjut, Samir Amin (1989) menerjemahkan bahwa upaya tersebut merupakan bentuk Eropanisasi dalam konsep *Eurocentrism*. Perspektif ini didukung oleh beberapa pandangan mengenai evolusi sosiokultural atas Modernisasi Eropa yang berkarakter kapitalis, modern, dengan bentuk pemerintahan demokratis (Habermas, 1981; Luhmann, 1984). Kluver menjelaskan bahwa Globalisasi merupakan alat yang dipakai dalam menyosialisasikan evolusi sosiokultural dari Modernisasi Eropa dalam wacana pembangunan (Modelski, Devezas dan Thompson, 2008, p. 401).

Bagi Anthony Giddens, "*modernity is inherently globalizing*" (dalam Held dan McGrew, 2000, p. 92). Selanjutnya, Immanuel Wallerstein (1974) memberi analisis lebih luas mengenai kondisi dan mekanisme atas sistem dunia yang semakin modern dan meng-global, "*the modern 'globalizing' world-system is the product of the 'capitalist world economy' that arose in Europe in the sixteenth*

¹¹ Kota-kota besar dunia yang dimaksud, yaitu: China, India, Jepang, Korea, Burma, Kamboja, Laos, Thailand, Vietnam, Indonesia, Kairo, Istanbul dan beberapa kelompok negara muslim Afrika.

¹² Sangat susah mendapatkan terjemahan dalam Bahasa Indonesia untuk konsep ini. Untuk sementara bisa dianalogikan sebagai suatu ide utama, inisiasi, dan/atau inovatif.

century and has now spread worldwide." (Modelski, Devezas dan Thompson, 2008, p. 3). Berdasarkan kedua argumen tersebut, modernisasi dan kapitalisme menjadi sebab asal mula globalisasi.

Westernisasi menjadi model pasti globalisasi karena merupakan dampak dari modernisasi dan kapitalisme, dua unsur dasar yang berkembang dalam sejarah pembangunan Eropa (*West*). Sifat ekspansif dan eksploitatif dalam kapitalisme Barat berkembang menjadi bentuk yang multi-dimensional, lebih membangun peradaban, dan akhirnya berujung pada transformasi. Modelski, Devezas dan Thompson (2008) mengenalkan globalisasi sebagai, "... (*the process of*) *emergence of institutions of planetary scope,*" proses institusionalisasi setiap aspek secara menyeluruh.

Globalisasi menjadi arena interaksi antar-aktor, baik negara maupun non-negara, yang dinamis. Dinamika ini bersifat transnasional yang berpengaruh terhadap bagaimana posisi dan tanggung jawab negara. Polanyi (1944) mendeskripsikan mekanisme utama dari dinamika transnasional dalam konsep *double movement*-nya. Terdapat ketergantungan antar-aktor dalam interaksi transnasionalnya yang dinamis. Dinamika tersebut menggambarkan bahwa sistem ekonomi global tidak dapat bangkit atau bertahan tanpa dukungan integrasi institusi negara 'ke luar.' Sedangkan, populasi nasional juga hanya dapat dijamin perlindungannya oleh proteksi ekonomi nasional. Negara dibutuhkan sebagai penyeimbang antara *movement in*-¹³ dan *movement out*-¹⁴ yang diakui oleh Polanyi berbahaya jika hanya didominasi oleh kesuksesan dan dominasi pihak tertentu saja.¹⁵

Dinamika transnasional saat ini kerap diwarnai keadaan di mana negara cenderung lebih tidak bisa melindungi populasi nasionalnya karena terbebani wacana proyek pembangunan dalam rezim internasional. Dibutuhkan analisis kritis untuk bisa melihat sisi lain dari pembangunan. Tanpa menganalisis pembangunan sebagai suatu rekayasa sosial yang diwacanakan, kita tidak akan mampu memahami bagaimana Barat (para Blok Kapitalis) mampu melanggengkan kendalinya secara sistematis dan bahkan menciptakan Dunia Ketiga secara politik, kultural dan sosiologis dalam rezim internasional.

Wacana Proyek Pembangunan untuk Agraria di Indonesia

Untuk sektor agraria, aturan internasional diatur dalam rezim Globalisasi Pertanian. Globalisasi Pertanian merupakan rezim perjanjian pertanian yang

¹³ Dengan tetap mempertahankan bentuk Keynesian Welfare State, sebuah sistem yang diciptakan melalui ukuran redistributif dalam pelayanan sosial dan perkembangan ekonomi global.

¹⁴ Dengan tetap aktif dalam pasar kapitalisme liberal, khususnya dalam sistem moneter.

¹⁵ Pendapat ini didukung oleh Ruggie (1982, p. 379-415) dalam argumennya tentang *embedded liberalism* dalam Bretton Woods System.

bersifat multilateral dalam kerangka WTO (tepatnya dimuat dalam *Agreement of Agriculture*, 1995). Setiap kebijakan dalam Globalisasi Pertanian selalu coba diarahkan untuk semakin pro-pasar bebas (Setiawan, 2003, p. 45). Aturan ini berlaku sebagai norma dalam struktur internasional rezim globalisasi pertanian pasca-kolonial. Indonesia juga menjadi obyek dalam rezim globalisasi pertanian. Intervensi norma internasional ini cukup berperan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan agraria Indonesia.

Penemuan paket arkeologis sejenis gerabah dan hasil domestikasi pertanian dari Cina yang berusia sekitar 2500 SM menjadi penanda eksistensi budaya agraria di Indonesia (Diamond, 2013, p. 436-437). Tata hubungan antar-manusia terkait pemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan tanah yang terus beradaptasi ini disebut struktur agraria dalam masyarakat (Wiradi, 2009, p. 108). Indonesia tidak hanya memiliki sumberdaya alam dalam sektor pertanian saja, tetapi juga didukung oleh sumberdaya agraria dari bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Potensi agraria yang masih bertahan hingga kini membuat Indonesia tetap identik sebagai negara agraris.

Susunan masyarakat agraris dapat berbeda, tergantung dari bagaimana corak agrariannya dari satu periode ke periode waktu yang lain. Tuma (1965, p. 17-18) menyebutkan enam unsur penentu bagaimana tatanan agraria di suatu negara, yaitu: (1) *land ownership*; (2) *land and income concentration*; (3) *class differentiation*; (4) *large versus small scale operation*; (5) *land or labour ratio*; dan (6) *underemployment*. Keenam unsur penentu tersebut masih membentuk tatanan yang relatif. Bagi Wiradi (2009, p. 111), terdapat beberapa faktor yang bekerja dan mempengaruhi relativitasnya, yaitu: (1) perubahan struktur politik; (2) perubahan orientasi politik; (3) perubahan kebijakan ekonomi; (4) perubahan teknologi; dan (5) faktor lain sebagai turunan keempat faktor sebelumnya.

Proyek pembangunan dan Globalisasi merupakan fenomena yang marak dibahas dalam ekonomi politik internasional kontemporer. Untuk sektor agraria di Indonesia, dominasi dan eksploitasi *power/knowledge* Blok Kapitalis menunjukkan perannya dalam proyek pembangunan dan globalisasi bagi perkembangan sosial dan pertumbuhan ekonomi nasional. Dominasi merupakan perwujudan dari kekuatan diskursus hegemoni (*hegemonic discourse*) yang berpotensi membentuk "rezim kebenaran" dalam kelompok masyarakat (Keeley, 1990, p. 91). Foucault (1972) menyatakan bahwa "rezim kebenaran" merupakan sebuah penilaian atas benar atau salahnya suatu opini/argumen, juga penentuan apakah opini/argumen tersebut bernilai atau hanya omong kosong (p. 223-224).

Diskursus hegemoni dalam proyek pembangunan untuk agraria membentuk standar normal yang bersifat preskriptif dalam perilaku keseharian. Keeley (1990) menanggapi bahwa elemen preskriptif yang terdapat dalam standar normal tersebut pada dasarnya tidak lazim, tetapi 'diupayakan' untuk

lazim, dalam argumennya, “. . . *behavior that adheres to a norm may not be statistically prevalent, although an order may wish to produce such prevalences . . .* (p. 91).” Standar normal yang sesungguhnya merupakan perintah tersebut berperan dalam transformasi identitas masyarakat atau negara. Transformasi tersebut dipengaruhi oleh rekayasa sosial berupa proyek pembangunan Dunia Ketiga.

Standar normal merupakan hasil dari tahapan awal dalam mekanisme wacana proyek pembangunan; yakni penciptaan abnormalitas (Fakih, 2009), atau profesionalisasi sub-disiplin pembangunan (Escobar, 1988). Dengan diakuinya abnormalitas tersebut, masyarakat direkayasa untuk butuh acuan standar menuju “kewajaran,” yang juga membutuhkan pendampingan dalam prosesnya. Tahapan berikut ini yang disebut Fakih (2009) sebagai pembentukan aparat pembangunan, sebagaimana yang didefinisikan Escobar (1988) sebagai institusionalisasi proyek pembangunan.

Tahap pendistribusian *power/knowledge* Blok Kapitalis secara nasional dan lokal diatur dalam mekanisme *local centers of power knowledge*¹⁶ di negara berkembang yang menyepakati dan menerapkan proyek pembangunan. Proyek distribusi *power* tersebut dikemas dalam wacana pembangunan Dunia Ketiga yang bertujuan menyukseskan dan mempertahankan pengaruh kapitalisme. Sektor agraria Indonesia juga larut dalam wacana proyek pembangunan. Wacana ini dikenal dalam Developmentalisme, suatu paham yang dilontarkan pada era Perang Dingin untuk membendung semangat anti-kapitalisme dan resmi menjadi doktrin kebijakan luar negeri Amerika Serikat sejak tahun 1949, saat kepemimpinan Presiden Harry S. Truman (Gendzier, 1985, p. 22-48).

Paradigma kritis menjadi model analisis utama dalam meneliti wacana pembangunan Dunia Ketiga. Sudut pandang tersebut menentukan posisi penulis dalam membedah mekanisme tahapan diskursus pembangunan untuk agraria di Indonesia. Sebagai suatu wacana, pembangunan untuk agraria menghasilkan “rezim kebenaran” dalam “rekayasa sosial” yang membawa kepentingan *Western Economics* para Blok Kapitalis. Wacana proyek pembangunan untuk agraria di Indonesia berperan dalam transformasi Indonesia sebagai negara agraris.

Indonesia berkembang dan tumbuh menjadi negara agraris yang semakin pro-kapitalis. Penelusuran mengenai mekanisme tahapan dalam proyek pembangunan untuk agraria yang berperan terhadap eksistensi dan keberlanjutan kapitalisme di Indonesia merupakan suatu hal yang penting. Kita

¹⁶ Teori ini merupakan pemikiran Foucault (1980a/1980b) tentang kontrol penciptaan dan pola kerja diskursus pembangunan. Terdapat dua tahapan utama, yaitu (1) *a field of intervention power* yang menciptakan *Development Studies* yang berperspektif Barat di negara dunia ketiga (Timur); dan (2) *a field of control knowledge* yang menciptakan *the deployment of development* sebagai aparat pembangunan internasional. Pemikiran Foucault ini juga dikembangkan oleh Arturo Escobar (1985) dalam bukunya *Discourse and Power in Development: Michael Foucault and the Relevance in His Work to the Third World* (Fakih, 2009, p. 189-191).

bisa mengetahui alasan keberhasilan penetrasi Barat dan fenomena pelemahan Indonesia dalam rezim internasional. Tidak hanya ditujukan sebagai media perlawanan bagi *power* Blok Kapitalis dalam wacana proyek pembangunan, tetapi juga sebagai alternatif *knowledge* yang menyuarakan kebutuhan dasar dan utama para kelompok Negara Dunia Ketiga, termasuk Indonesia, dalam rezim internasional. Argumen tersebut yang penulis telusuri dalam penelitian ini.

Alur Pemikiran

Perspektif kritis menjadi panduan dalam proses penelitian. Penelitian ini dibantu dengan pendekatan analisis wacana terhadap pembangunan Dunia Ketiga. Wacana pembangunan menghasilkan standar normal yang dijadikan alat ukur untuk tumbuh dan berkembangnya suatu masyarakat. Perubahan sosial dengan standardisasi yang dimaksud menjadi wujud suksesnya rekayasa sosial dalam masyarakat.¹⁷ Rekayasa sosial dalam wacana proyek pembangunan dirangkai dalam “rezim kebenaran” yang selalu dibayang-bayangi pola kapitalisme dari sistem ekonomi Barat¹⁸ (Keeley, 1990; Escobar, 1988, p. 437; Fakhri, 2009). Sistem ekonomi Barat merupakan suatu disiplin dengan prinsip *Homo Economicus*.¹⁹ Dengan prinsip tersebut, penyesuaian kelompok non-Barat terhadap praktik dan rasionalitas ekonomi Barat merupakan suatu fenomena yang tidak terhindarkan. “Komodifikasi” merupakan istilah ilmiah yang sering dipakai untuk praktik penyesuaian atas suatu disiplin dalam masyarakat (Diamond, 2013; Fakhri, 2009; Frank, 1998).

Terdapat kecenderungan di mana proyek pembangunan kerap kali mengalami pembaharuan, tetapi masih dan selalu dengan orientasi laba dan target akumulasi kapital yang tidak pernah hilang. Kecenderungan karakter sistem perekonomian Barat tersebut akan dikritisi dengan mendekonstruksi wacana pembangunan Dunia Ketiga, khususnya di Indonesia. Rezim kebenaran, suatu rezim kapitalis dengan prinsip ekonomi Barat, adalah salah satu temuan dalam proyek pembangunan Dunia Ketiga pada tahap awal penelitian.

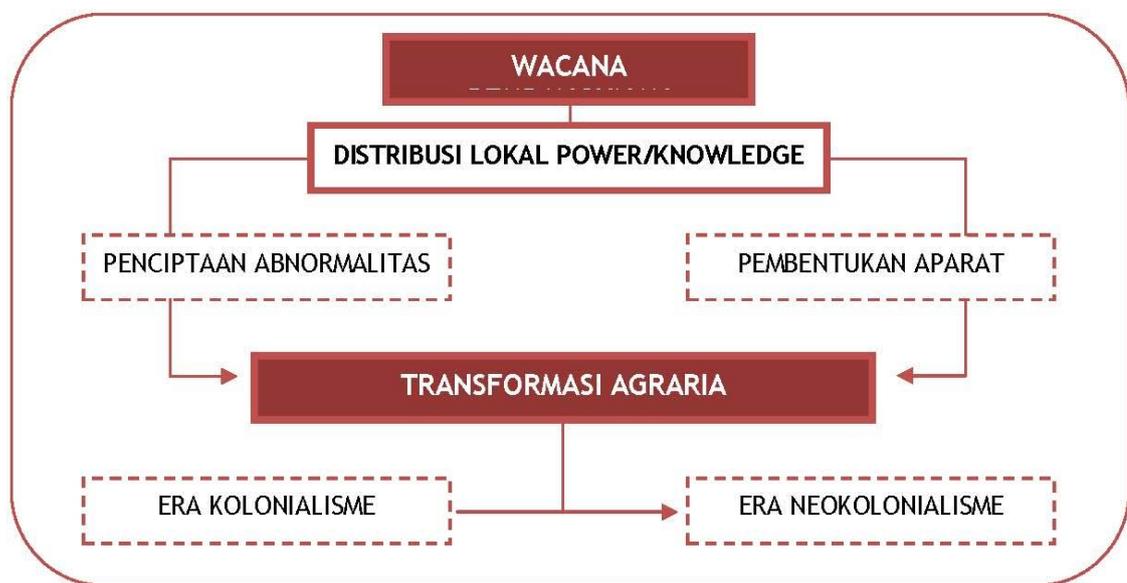
Fenomena wacana pembangunan Dunia Ketiga yang membawa rezim kapitalis dengan prinsip Ekonomi Barat-nya merupakan temuan atas salah satu komponen dalam penelitian. Selanjutnya, temuan tersebut akan dianalisis

¹⁷ Pemikiran ini berakar dari logika Foucauldian Analysis yang menjelaskan pola dari standar normal – rekayasa sosial – dan rezim kebenaran. Lebih lengkapnya dapat dilihat dalam Keeley (1990, p. 91-93).

¹⁸ Sistem Ekonomi Barat merupakan penerjemahan peneliti atas konsep Western Economics yang dipakai dalam referensi Escobar (1988).

¹⁹ Konsep *homo economicus* tersirat dari penjelasan Adam Smith mengenai pemikiran ekonomi klasik dalam karyanya *Wealth of Nation* pada 1776. Argumen bahwa sistem perekonomian Barat merupakan suatu disiplin dengan prinsip tersebut penulis simpulkan berdasarkan sifat karakternya yang berada dalam pusat teori ekonomi neoklasik (teori utilitarian, hedonis dan menitikpusatkan pada diri-sendiri, yang rasionalis dan beretika individualis). Ia egois, rasional, berupaya untuk mencapai utilitas secara maksimum (Lunati, 1997).

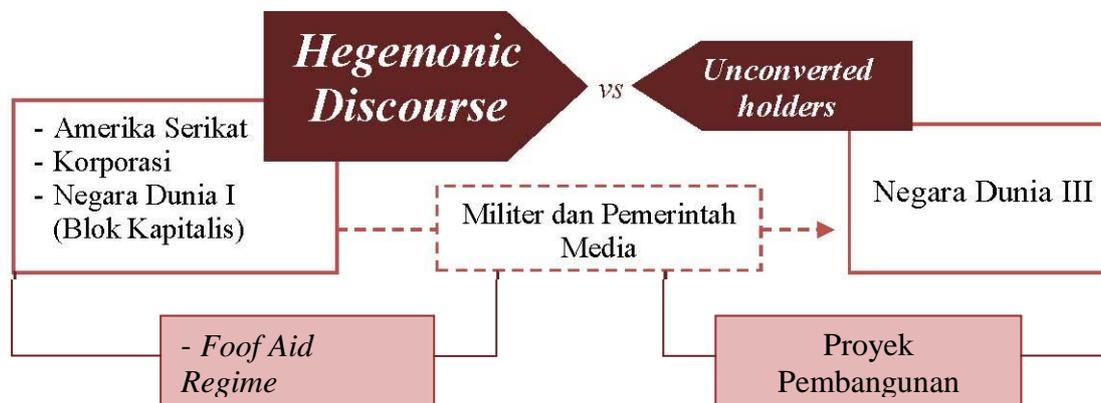
melalui pendekatan distribusi lokal atas *power/knowledge* yang dikenalkan oleh Fakhri (2009) dan Escobar (1988). Peran distribusi lokal atas *power/knowledge* terhadap transformasi agraria di Indonesia menjadi fokus analisis dari dilema kapitalisme yang dipertanyakan dalam penelitian. Alur pemikiran ini akan mengantar penelitian pada penelusuran kritis atas eksistensi dan bertahannya kapitalisme dalam proyek pembangunan untuk agraria di Indonesia. Indonesia sebagai negara agraris mengalami transformasi dalam bayang-bayang prinsip perekonomian Barat; kapitalisme. Alur pemikiran dalam penelitian selanjutnya disederhanakan dalam bagan 1.



Bagan 1 Alur Pemikiran dalam Penelitian

PEMBAHASAN

Penelusuran wacana proyek pembangunan Dunia Ketiga mengantar penelitian pada tiga temuan utama, yaitu: (1) skema *power/knowledge* Blok Kapitalis dalam rezim internasional; (2) para aparat pendukung proyek pembangunan untuk agraria di tingkat nasional dan lokal; dan (3) transformasi agraria yang cenderung semakin pro-kapitalis sebagai realitas sosial di Indonesia. Temuan pertama adalah skema rezim internasional yang ternyata pada dasarnya merupakan kompetisi antara dua kekuatan, yaitu kelompok *hegemonic discourse* dan *unconverted holders*.



Bagan 2 Skema *power/knowledge* Blok Kapitalis (1st World) dalam rezim internasional

Secara kritis, para Blok Kapitalis mengupayakan diskursus hegemoni melalui *Food Aid Regime* dan politik luar negeri Amerika Serikat dalam PL 480 (*Public Law 480*) yang mewacanakan Revolusi Hijau dan Revolusi Biru di Negara Dunia Ketiga. Agenda ini diterjemahkan dalam Proyek Pembangunan Nasional karena dikemas dalam komersialisasi dan industrialisasi Negara Dunia Ketiga, termasuk Indonesia, yang berorientasi pada pendapatan nasional. Pendapatan ini yang berperan pada pertumbuhan ekonomi, yang dilogikakan dapat mengatasi masalah kemiskinan global. Penyebaran dan implementasi strategi pembangunan di berbagai Negara Dunia Ketiga, termasuk Indonesia, menjadi penanda atas lahirnya “pabrik pembangunan.” Pabrik pembangunan ini dikonsepsikan untuk menghasilkan standar normal dalam perubahan sosial di masyarakat. Dan karena merupakan produk hasil, standar-standar normal dalam wacana pembangunan tidak bisa lepas dari *power/knowledge* pihak pengontrol dan pengendalinya (Escobar, 1988, p. 437).

Dunia pernah bertahan dalam sistem produksi pangan dan perekonomian yang terbuka. Perdagangan bebas menjadi bentuk interaksi antar-kelompok²⁰ pada saat itu. Untuk Asia Tenggara, dokumen Dinasti Han dari China mencatat bahwa interaksi perdagangan sudah ada sejak abad ke-2 Masehi (Frank, 1998, p. 92). Beberapa referensi lain juga menyebutkan bahwa interaksi dagang telah dimulai sejak abad ke-2 SM (Glover, 1991; Francis, 1991, p. 40). Dan di Indonesia, sistem produksi pangan, suatu penanda bagi mulainya peradaban dan budaya hidup menetap di suatu wilayah, ditemukan telah mulai sejak tahun 2500 SM (Diamond, 2013). Dengan demikian, meski baru diakui dan dikenalkan oleh Marx pada pertengahan abad ke-19, model produksi Asia dalam sistem

²⁰ Konsep kelompok penulis gunakan, mengingat peradaban dalam sistem perekonomian dunia pada saat itu sangat beragam, dengan lembaga adat dan struktur sosial masing-masing wilayah yang berbeda.

perdagangan dunia telah berlangsung sejak abad ke-2 sebelum Masehi di Asia Tenggara.

Interaksi dagang di wilayah Asia Tenggara dengan model produksi Asia yang tertib sejak abad ke-2 SM mulai bergejolak sejak Eropa turut serta pada abad ke-15. Gejolak tersebut memberi perkembangan positif terhadap rute perdagangan Asia Tenggara yang mencapai puncaknya pada abad ke-14 hingga abad ke-18. Namun, perkembangan positif itu tidak untuk rakyat dan bangsa Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Temuan kedua adalah aparat-aparat pendukung proyek Pembangunan untuk agraria di tingkat nasional dan lokal. Penulis menemukan histografi penetrasi Barat di Indonesia. Belanda, melalui VOC, menjalankan hubungan diplomatis pertama ke Nusantara (Indonesia) pada tahun 1602 di wilayah Aceh. Konsolidasi perdagangan ini dengan mudah terjalin karena Belanda tidak dipandang seperti Portugis yang telah lebih dulu datang dan meninggalkan kesan buruk. Dan sejak Kerajaan Mataram menyerahkan Cirebon pada 1681, Belanda melalui VOC memulai kekuasaannya di Hindia Belanda; Indonesia.

Penetrasi Barat sesungguhnya telah berlangsung sejak era kolonialisme dalam sistem agraria di Indonesia. Dalam prosesnya, pernah ada (1) Registrasi Kadastral masa pemerintahan Raffles pada 1811-1816; (2) Sistem Tanam Paksa masa Van den Bosch pada 1830-1870; dan (3) *Agrarische Wet* Hindia Belanda pada 1870-1942. Penetrasi ini membawa *Western value* dalam sistem agraria domestik yang mengatur: (1) sistem kekuasaan, dengan adanya hak penguasaan dan hak pemilikan untuk sebidang tanah, kebun, maupun hutan, melalui klaim dan registrasi tanah; (2) sistem pelabelan, dalam identitas dan pengetahuan mengenai struktur formasi sosial dengan kontrol yang berpeluang pada eksploitasi, baik alam maupun manusia; dan (3) model produksi kapitalis yang senantiasa berorientasi laba melalui komodifikasi berbagai potensi agraria di Indonesia.

Eksplorasi di bawah penjajahan Belanda dan Jepang menjadi pelajaran berharga bagi Bangsa Indonesia. Selain memicu gerakan perlawanan dalam perang gerilya, para pemikir bangsa juga dimotivasi untuk merumuskan pola ideal dalam membentuk, membangun dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kultur klaim dan eksploitasi wilayah selama era kolonialisme perlu dibebaskan dalam kemerdekaan, lalu diberdayakan sedemikian rupa untuk kesejahteraan sosial rakyat dan kedaulatan Bangsa Indonesia.

Merdeka dan berdaulat adalah visi setiap bangsa dan negara pada periode dekolonisasi. Namun ternyata, periode dekolonisasi menyiratkan era neokolonial (penjajahan wajah baru) dalam wacana proyek pembangunan Dunia Ketiga. Escobar (1988) menjelaskan,

“Western Economy, understood as the ensemble of three systems that coalesced at the end of the 18th century in northwestern Europe: a system of production (broadly, the capitalist world economy), a system of power (disciplinary and normalizing mechanisms), and a system of signification (ideology, science, and representation, including philosophical currents such as liberalism and utilitarianism, and a dominant code articulated around the notions of labor and production) (p. 438).”

Revolusi Hijau, misalnya, memiliki produktivitas yang sangat bergantung pada asupan berupa bibit unggul, pupuk buatan, insektisida, pestisida, herbisida, kredit petani kecil, pembimbing pertanian, dan ‘jaringan kuat’ pemerintah dalam *food aid regime*. Rekayasa ini membawa wacana industrialisasi dan komersialisasi yang berorientasi pada hasil dan pendapatan dari pasar internasional (Bernstein, 1996; Fei dan Rains, 1964). Wacana tersebut terus disosialisasikan oleh para tenaga ahli penyuluh alumni program SEARCA (*Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture*). Alokasi dana pinjaman dari Bank Dunia untuk pendirian beberapa pabrik pupuk kimia di Palembang, Cikampek, Samarinda, Gresik, dan Lhokseumawe, mendukung industrialisasi dan komersialisasi pertanian di Indonesia (Wiryo, 2003, p. 190-194).

Rekayasa sosial berikutnya adalah ide “Pasar Tanah” di Indonesia. Bank Dunia mengembangkan ide ini sejak awal dekade 1990 untuk mengawal proyek pembangunan di Indonesia. Reforma agraria dalam “Revolusi Sosialis Indonesia” tidak mendukung proyek pembangunan Dunia Ketiga, sehingga dibutuhkan berbagai penyesuaian dalam pola penguasaan, kepemilikan, dan pemanfaatan tanah negara. Proyek *Indonesian Land Administration Project* (ILAP, 1995-1999), lalu dilanjutkan *Land Management and Policy Development Programme* (LMPDP, 2004-2009) dari Bank Dunia, berhasil mendorong Indonesia mereformasi kebijakan, manajemen, dan administrasi pertanahan. Penggantian PP No. 10/1962 tentang pendaftaran tanah yang mengacu pada UUPA 1960 menjadi PP No. 24/1997, dengan prosedur yang dianggap lebih praktis dan efisien, memudahkan izin lokasi untuk industrialisasi pertanian, perkebunan besar, pertambangan, dan sektor lain yang membutuhkan lahan sebagai lokasi usahanya (World Bank, 1994, 2004).

Penyesuaian pembangunan untuk agraria di Indonesia menunjukkan dinamika transformasi berupa sebagaimana dijelaskan dalam tabel 1. Dinamika transformasi agraria tersebut mengantar penulis pada temuan ketiga, yaitu kecenderungan pro-kapitalis dalam realitas sosial di Indonesia sebagai negara agraris.

Tabel 1 Dinamika Transformasi Agraria di Indonesia

ORDE LAMA	ORDE BARU
Revolusi Sosialisme Indonesia (Reforma Agraria)	Pembangunan Agraria
Sosialisme Indonesia berprinsip berjalan bersama-sama dalam setiap bagian masyarakat Indonesia (struktur politik, ekonomi, hubungan sosial, budaya dan bahkan dalam kehidupan rakyat) di bawah kekuasaan presiden yang koordinatif (Caldwell dan Utrecht, 1979, p. 167)	peningkatan produktivitas pertanian, khususnya produktivitas pangan, dan pembangunan pedesaan dapat dicapai tanpa melalui reforma agraria, tetapi cukup dengan perbaikan dan peningkatan teknologi serta pemberian insentif untuk berproduksi.
- Orientasi: Redistribusi tanah - Prinsip: "Tanah untuk Rakyat dan Penggarap"	- Orientasi: Tanah sebagai komoditas ekonomi - Prinsip: "Tanah untuk Investasi"

Realita Sosial dalam Transformasi Agraria Indonesia

Warisan kolonial Indonesia menyisakan ketimpangan struktur agraria yang masih saja menjadi agenda permasalahan sejak 1945. Hasil redistribusi tanah dalam Revolusi Sosialisme Indonesia belum terasa saat pemerintah memutuskan peralihan kebijakan agraria secara mendasar pada periode Rezim Orde Baru. Wiradi dan Bachriadi (2011) membagi dua jenis ketimpangan dalam struktur agraria Indonesia, yaitu: (1) antara penyediaan lahan untuk kepentingan ekstraksi para perusahaan besar yang berorientasi profit dan penyediaan lahan bagi aktivitas pertanian rakyat; dan (2) ketimpangan penguasaan dalam redistribusi tanah yang tidak adil di antara kelompok-kelompok pertanian (p. 12).

Sektor yang rentan timpang dalam Agraria di Indonesia:

- Kehutanan Skala Besar
- Pertambangan Skala Besar
- Perkebunan Skala Besar
- Pemukiman (Pemukiman Mewah dan Golf)
- Pertanian untuk Rakyat



Bagan 3 Faktor Terkait dalam Struktur Agraria

Rasio penguasaan wilayah hutan dan non-hutan Indonesia memiliki tingkat ketimpangan yang sangat tinggi. Pada tahun 2003, pemerintah mencatat memiliki luas wilayah hutan 190,5 juta hektar, di mana 67,4% dari luas tersebut

adalah wewenang negara (hutan negara) (Bachriadi dan Sarjono, 2006, p. 3). Wilayah yang tergolong “hutan negara” ini rentan dieksploitasi karena ada yang disebut konsesi. Konsesi merupakan kesepakatan antara negara dan pihak yang dipercayai untuk mengelola pemanfaatan sumberdaya di hutan; perusahaan negara. Di Jawa misalnya, luas wilayah “hutan negara” sekitar 3 juta hektar lebih, di mana 2,4 juta hektar hak konsesinya diberikan pada perhutani (perusahaan negara) (Dewan Kehutanan Nasional, 2013).

Eksplorasi dalam agraria di Indonesia dapat dilihat dari kecenderungan konsentrasi pada area penguasaan tanah. Selain wilayah “hutan negara” yang rentan, areal perkebunan besar di hutan (perkebunan kayu) juga mengalami peningkatan yang signifikan. Jika pada tahun 2001 luas areal perkebunan kayu sekitar 67.000 hektar, terjadi peningkatan signifikan pada 2005 yang mencatat pencapaian luas areal perkebunan kayu sudah 606.000 hektar (Wiradi dan Bachriadi, 2011, p. 13).²¹

Terdapat fenomena unik dalam realitas penguasaan lahan tambang pada tahun 1999 di Indonesia. Tercatat, 555 perusahaan pertambangan (baik asing maupun domestik) menguasai sekitar 264,72 juta hektar lahan. Padahal, luas lahan hutan Indonesia hanya 190, 47 juta hektar saja (KLHK, data hingga 2011).²² Kembali terbukti bahwa izin lokasi untuk konsesi perusahaan masih rentan tumpang tindih, bahkan bisa memberikan total izin pengelolaan tambang yang jauh lebih luas dari pada luas tanah Indonesia.

Permintaan dunia atas minyak nabati merupakan peluang yang menarik bagi perkembangan industri bahan bakar nabati (*biofuel*) di Indonesia. Hingga tahun 2000, tercatat 2.178 perusahaan swasta dan negara yang rata-rata menguasai sekitar 16.000 hektar lahan untuk perkebunan besar. Total lahan perkebunan industri saat itu mencapai 3,52 juta hektar (BPS 2001, diolah oleh Wiradi dan Bachriadi, 2011, p. 14). Luas ini mengalami penambahan pesat dalam perencanaan saat itu (2000-2002) atas penyediaan lahan sekitar 20 juta hektar untuk kebun sawit yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua (Colchester, 2006, p. 26).

Pada tahun 2002, 6 juta hektar dari lahan perencanaan kebun sawit telah ditanami oleh perusahaan perkebunan swasta dan negara. Dari total lahan tersebut, 3 juta hektar nya telah ditanami oleh pihak swasta. Dari total perusahaan swasta yang berpartisipasi, terdapat sekitar 50-an perusahaan milik Malaysia yang beroperasi (Colchester, 2006, p. 22). Sementara PTP (Perseroan

²¹ Data ini diakses Wiradi dan Bachriadi dari situs resmi Asosiasi Pengusahaan Hutan Indonesia (APHI) pada 29 April 2009, dari situs www.aphi-net.com, keterangan tabel IV 5.1, –Asosiasi Pengusahaan Hutan Indonesia (2007).

²² Dalam data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) hingga 2011, tercatat lahan hutan Indonesia dengan total 190,47 hektar terdiri dari hutan konservasi (26,82 juta ha), hutan lindung (28,86 juta ha), hutan produksi terbatas (24,46 juta ha), hutan produksi (32,60 juta ha) (Putri, 2015, dari www.gresnews.com).

Terbatas Perkebunan), perusahaan perkebunan negara, hanya menguasai sekitar 770.000 hektar lahan sawit untuk dimanfaatkan pada tahun 2005 (Colchester, 2006. P. 42).

Sektor pemukiman berupa Kota Baru dan Pariwisata juga menjadi ruang gerak negara dan aktor terkait dengan tujuan investasi untuk akumulasi kapital. Bachriadi dan Lucas (2001) mencatat perkembangan penguasaan dan pemanfaatan tanah untuk pembangunan rumah mewah di atas 74.735 hektar tanah yang diizinkan BPN pada 1998. Fenomena lapangan golf sebagai pendamping rumah mewah juga jadi pelengkap ketimpangan dalam struktur agraria Indonesia. Pada tahun 2006/2007, terdapat sekitar 109 *country club* lapangan golf yang masing-masing menggunakan sekitar 350 hektar tanah.²³

Lahan yang dialokasikan untuk pertanian rakyat adalah sisa dari penguasaan dan pengelolaan dari keempat sektor sebelumnya, yakni proyek kehutanan, pertambangan, perkebunan, dan pemukiman. Lahan pertanian untuk rakyat dapat dilihat dari keadaan rumah tangga petani²⁴ di Indonesia. Wiradi dan Bachriadi (2011) membagi “rumah tangga petani” dalam dua kelompok, antara lain: (1) petani pengguna tanah (*peasant landholders*), kelompok petani yang punya hak penguasaan terhadap lahan; dan (2) petani tanpa lahan (*landless farm household/absolute landless*) (p. 61).

Tabel 2 Gambaran Rumah Tangga Petani Indonesia (1973-2003)

Tahun Sensus	1973	1983	1993	2003
Total jumlah rumah tangga petani (juta)	21,6 (100%)	23,8 (100%)	30,2 (100%)	37,7 (100%)
Jumlah rumah tangga petani tanpa lahan (juta) <i>*absolute landless</i>	7,1 (33%)	5,0 (21%)	9,1 (30%)	13,4 (36%)
Jumlah rumah tangga petani pengguna lahan (juta) <i>*peasant landholders</i>	14,5 (67%)	18,8 (79%)	21,1 (70%)	24,3 (64%)
Jumlah total penguasaan lahan oleh petani pengguna (<i>peasant landholders</i>)	14,2	16,8	17,1	21,5
Rasio gini penguasaan tanah	0,70	0,64	0,67	0,72

Keterangan:

* Rasio gini dihitung berdasarkan data jumlah rumah tangga pertanian dan *absolute*

²³ Data ini diambil dari Wiradi dan Bachriadi (2011, p. 15) atas data dan analisisnya mengenai lahan rumah mewah dan lapangan golf; dibantu gambaran visual dari “Indonesia Golf Map” akses 2015.

²⁴ Rumah tangga petani digunakan BPS sejak sensus pertanian pertama (1963) yang mengacu kepada setiap rumah tangga yang memiliki minimal satu anggota keluarga terlibat dalam kegiatan pertanian sebagai sumber pendapatan.

landless pada tahun 1973 (Kano, 1994) dan hasil sensus pertanian sejak 1973 oleh BPS

* Data pertanian hanya mencakup rumah tangga dalam kegiatan bercocok tanam. Sektor pertanian lain, seperti peternakan sapi, unggas, tambak ikan, dan buruh perkebunan tidak dimasukkan

Sumber: Sensus pertanian 1973, 1983, 1993, 2003 (BPS, 2004; BPS 1975; Sensus Pertanian 2003); Kano, 1994; Gunawan dan Wiradi, 2011; data telah diolah kembali.

Rasio gini yang tidak pernah mencapai 0,5 menunjukkan ketimpangan yang perlu ditindaki dengan hati-hati. Terdapat beberapa gambaran mengenai profil rasio gini agraria Indonesia. *Survey Agro-Economy* (SAE) menunjukkan rasio gini penguasaan tanah di Indonesia berkisar 0,54-0,91 pada 1969-1971 dengan sampel 15 desa di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan (Wiradi, 1984, p. 309). Angka rasio gini yang ditampilkan dalam tabel memang lebih rendah daripada rasio gini khusus untuk wilayah Jawa yang selalu berkisar 0,6-0,9 (Kano, 1990; Wiradi, 1984; Booth, 1988).

Proyek pembangunan memudahkan transformasi pertanian (transformasi agrikultur) yang identik dengan industrialisasi dan komersialisasi. Model ini membutuhkan orientasi pasar yang lebih besar atas produktivitas pertanian, meningkatkan input non-pertanian dari peningkatan pembelian atas pendapatan pertanian, spesifikasi produksi dalam sistem pertanian, dan peningkatan pendapatan dari jasa non-agrikultur (Fei dan Rains, 1964).²⁵ Transformasi agraria merupakan realita sosial lanjutan atas industrialisasi dan komersialisasi pertanian.

Wacana pembangunan Indonesia yang berorientasi pada industri besar dan pembangunan infrastruktur pendukung semakin menegaskan posisi “tanah untuk pembangunan” yang dikampanyekan sejak Rezim Orde Baru. Penolakan penduduk lokal atas rencana pembangunan pabrik semen yang mengancam penguasaan dan pemanfaatan lahan di Rembang, Pati dan Wonogiri; penolakan masyarakat adat suku Kamoro, Papua, atas pembangunan smelter tembaga di Timika; serta berbagai sengketa lahan atas pemanfaatan tanah untuk akumulasi kapital, baik oleh negara maupun perusahaan besar, menjadi fakta sosial atas ketimpangan penguasaan lahan. Profil agraria Indonesia diwarnai realita sosial atas ketimpangan penguasaan dalam struktur agraria, dan berbagai sengketa atau konflik tanah, yang merupakan tanggung jawab negara atas amanah Bangsa Indonesia.

Penutup

²⁵ Argumen ini dikonsepsikan sebagai commercialization of agriculture oleh Fei dan Rains (1964).

Proyek pembangunan merupakan suatu rekayasa sosial kelompok *hegemonic discourse* dalam rezim internasional. Wacana ini menjalankan tugasnya dengan baik sebagai media *power/knowledge* Blok Kapitalis di negara Dunia Ketiga. Manajemen dan manipulasi atas proyek pembangunan nasional dan lokal di setiap negara Dunia Ketiga pada dasarnya merupakan strategi Blok Kapitalis untuk tetap menjaga stabilitas kontrol dan dominasinya dalam dinamika kompetisi antar-*power/knowledge* pasca-Perang Dunia II (Gendzier, 1985).

Proyek pembangunan menjadi wajah baru kolonialisme dalam era dekolonisasi (McMichael, 2012). Fakih (2009) menyebutnya dalam periode neokolonialisme. Pembangunan dilatarbelakangi 'kepentingan' Negara Dunia Pertama (Blok Kapitalis) terhadap Negara Dunia Ketiga (Esteva, 1992). Berbagai ide dasar berupa akumulasi kapital dan kompetisi individual untuk hasil/pendapatan diwacanakan sebagai 'rezim kebenaran/standar normal' dalam moral ekonomi masyarakat Asia.

Asia tidak seperti itu, setidaknya pada pertengahan abad ke-19, ketika Marx (1853) menemukan dan mengakui model produksi Asia yang tertib, statis, dan non-dialektis (Avineri, 1968). Masing-masing negara di Asia memiliki model produksinya sendiri dengan karakteristik dasar tersebut, seperti China, India, dan beberapa negara Asia Barat (Afrika Utara). Untuk Indonesia, model produksi Asia dalam produktivitas pertanian dan sistem agraria lokal didukung oleh etika subsistensi yang mengutamakan keamanan dan kepentingan bersama dalam Pancasila (Scott, 1981; Tjondronegoro, 2008; Hatta, 1992).

Etika subsistensi dalam moral ekonomi masyarakat agraris di Indonesia mulai terkikis sejak penerapan berbagai rekayasa sosial dalam proyek pembangunan. Agenda perubahan sosial dalam proyek pembangunan secara tidak langsung membuat Indonesia mengingkari identitasnya sebagai negara agraris. Pada akhirnya, selain menjadi target para borjuis kapitalis, akumulasi kapital juga menjadi visi Indonesia dalam proyek pembangunan.

Proyek pembangunan merupakan strategi sosial yang dirumuskan berdasarkan hakikat dan logika kapitalisme untuk mengejar laba/keuntungan, dan lalu membelanjakannya kembali untuk kebutuhan pembangunan itu sendiri. Pemerintah nasional dan lokal yang sepakat terhadap proyek pembangunan dan pembangunan berkelanjutan, sesungguhnya merupakan aparat para Blok Kapitalis yang terus melakukan rasionalisasi atas penetrasi Barat di wilayah non-Barat. Distribusi lokal atas *power/knowledge* kelompok *hegemonic discourse* berhasil menumbuhkan dan mempertahankan eksistensi kapitalisme dalam proyek pembangunan untuk agraria di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Amin, Samir. (1989). *Eurocentrism*. London: Zed.
- Avineri, Shlomo. (1968). *The social and political thought of Karl Marx*. Cambridge: Cambridge University Press
- _____. (1969). *Karl Marx on colonialism and modernization*. Garden City, New York: Anchor Books.
- Bachriadi, Dianto, dan Anton Lucas. (2001). *Merampas tanah rakyat: kasus Tapos dan Cimacan*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Bachriadi, Dianto, dan Gunawan Wiradi. (2011). *Enam dekade ketimpangan: Masalah penguasaan tanah di Indonesia*. Bandung: kerja sama Agrarian Resource Centre, Bina Desa, dan KPA.
- Bachriadi, Dianto, dan Mustofa Agung Sardjono. (Juni 2006). *Local action to return community control over forest lands in Indonesia: Conversion and Occupation*; dipresentasikan pada "the 11th Biennial Conference of International Association for the Study of Common Property (IASCP), Bali, Indonesia.
- Bernstein, H. (1996). *Agrarian questions then and now*. *Journal of peasant studies*, 24, 1, 22-59.
- Booth, Anne. (1988). *Agricultural Development in Indonesia*. Sydney: Allen and Unwin.
- Colchester, Marcus, et.al. (2006). *Promised land: Palm oil and land for acquisition in Indonesia – implications for local communities and indigenous peoples*. Bogor: kerja sama Forest People Program, Perkumpulan Sawit Watch, HuMa dan the World Agro-forestry Centre.
- Dewan Kehutanan Nasional (2013). *Harlah STI: Miskin, di tengah melimpahnya sumberdaya alam*; dari <http://dkn.or.id/2013/03/02/harlah-sti-miskin-ditengah-melimpahnya-sumberdaya-alam/> akses pada 10 Juni 2014, pukul 20.08 WIB.
- Diamond, Jared. (2013). *Guns, germs, and steel: Rangkuman riwayat masyarakat manusia (bedil, kuman dan baja) (Hendarto Setiadi & Damaring Tyas Wulandari Palar, Penerjemah)*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG).
- EIU, The Economist Group (May, 2014). *Global food security index*. <http://foodsecurityindex.eiu.com/Country/Details#Indonesia>, Akses 25 Maret 2015.
- Esteva, Gustavo. (1992). *Development*. Dalam Wolfgang Sachs (Ed.) *The development dictionary*. London: Zed.
- Escobar, Arturo. (1988). *Power and visibility: Development and the invention and management of the Third World*. *Cultural Anthropology*, 3, 4, 428-443.
- Fakih, Mansour. (2009). *Runtuhnya teori pembangunan dan globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan INSIST Press.

- Fei, J., dan G. Rains. (1964). *Development of the labor surplus economy*. Homewood: Irwin.
- Foucault, Michel. (1972). *The archaeology of knowledge and the discourse on language*. New York: Pantheon Books.
- _____. (1980a). *The history of sexuality, 1*. New York: Vintage Books.
- _____. (1980b). *Power of knowledge: Selected interview and other writing*. New York: Pantheon.
- Frank, Andre Gunder. (1998). *ReOrient: Global economy in the asian age*. USA: University of California Press.
- Gendzier, Irene L. (1985). *Managing political change: Social scientists and the third world*. United States of America: Westview Press, Inc.
- Glover, Ian C. (1991). "The Southern Silk Road: Archaeological evidence for early trade between India and Southeast Asia." Dalam Seminar UNESCO tentang "Silk Roads Maritime Route Seminar" di Bangkok.
- Gordon, Alec. (2010). *Netherlands East Indies: The large colonial surplus of Indonesia, 1878-1939*. *Journal of contemporary Asia*, 40, 3, 425-443.
- Habermas, J. (1981). *Theories des kommunikativen handelris, vol. 2*. Frankfurt: Suhrkamp.
- Hatta, Muhammad. (1992). *Beberapa pokok pikiran (Sri-Edi Swasono dan Fauzie Ridjal, Eds.)*. Jakarta: UI-Press.
- Held, David. (1997). "Democracy: From city states to cosmopolitan order?" Dalam Robert E. Goodin dan Phillip Peltit (Eds.) *Contemporary political philosophy: an anthology* (78-101). Oxford Blackwell Publishers.
- Held, D., dan A. McGrew. (2000). *The global transformation reader: An introduction to the globalization debate*. Cambridge: Polity Press.
- Hegel, G. W. F. (1956). *The philosophy of history* (J. Sibree, penerjemah, dan C. J. Friedrich, ed.). New York.
- Heilbroner, Robert L. (1991). *Hakikat dan logika kapitalisme* (Hartono Hadikusumo, Penerjemah). Jakarta: LP3ES.
- Ichlas, Hertasning. (25-31 Agustus 2014). *Daulat pangan: Hilangnya makanan lokal dan merebaknya makanan instan tanda rapuhnya ketahanan pangan*. *GeoTimes Magazine*, 26-29.
- Iryanti, Rahmah. (3 Maret 2015). *Kemiskinan dan pemerataan pembangunan—RPJMN 2015-2019*. Makalah ini dipresentasikan dalam Seminar dan Lokakarya "Ketimpangan dan Arah Pembangunan Nasional dan Internasional" oleh INFID, Jakarta, Indonesia.
- Kano, Hiroyoshi. (1990). "Landless peasant households in Indonesia." Dalam Takeshi Shiroisi (Ed.) *Approaching Soeharto's Indonesia from the margins*. *Translations of contemporary Japanese scholarship on Southeast Asia*, Cornell University, Vol. IV, p. 43-73.

- _____. (1994). *Pagelaran: Anatomi sosial ekonomi pelapisan masyarakat tani di sebuah desa di Jawa Timur*. Yogyakarta: UGM Press.
- Keeley, James F. (1990). *Toward a Foucauldian analysis of international regimes*. *International organization*, 44, 1, Winter.
- Luhmann, N. (1984). *Sociale systeme*. Frankfurt: Suhrkamp
- Lunati, Teresa. (1997). *Ethical issues in economics: From altruism to cooperation to equity*. KOTA: Palgrave Macmillan, Ltd.
- Marx, Karl. (1844). *Economic and philosophical manuscripts*.
- _____. (1867). *Das Kapital*.
- McMichael, Philip. (2012). *Development and social change: A global perspective*, 5th edition. United States of America: Sage Publication, Inc.
- Modelski, George., Tessaleno Devezas, William R. Thompson (Eds.). (2008). *Globalization as evolutionary process: Modeling global change*. New York: Routledge.
- O'Brien, Patrick. (1997). "Globalisation and the state." Dalam Ralph Miliband and Leo Panitch (Eds.) *Socialist register 1994: Between globalism and nationalism*. London: The Merlin Press.
- Putri, Aditya Widya, dan Ramidi. (29 April 2015). *Negara akan sita lahan konsesi yang abaikan lingkungan*. *Gresnews*. <http://www.gresnews.com/berita/ekonomi/1030294-negara-akan-sita-lahan-konsesi-yang-abaikan-lingkungan/>, akses 10 Juni 2015.s
- Polanyi, Karl. (1944). *The great transformation: The political and economic origins of our time*. Boston: Beacon Press.
- Ruggie, John Gerard. (1982). *International regimes, transactions, and change: Embedded liberalism in the postwar world*. *International Organizations*, 36, 2, 379-415.
- Said, Edward. (1978). *Orientalism*. New York: Random House.
- Scholte, Jan Aart. (1997a). *Global capitalism and the state*. *International Affairs*, 73, 3, 427-452.
- _____. (1997b). *The globalization of world politics*. Dalam John Baylis dan Steve Smith (Eds.). *The globalization of world politics: an introduction to international relations* (pp. 13-30). Oxford: Oxford University Press.
- Scott, James C. (1981) *Moral ekonomi petani: Pergolakan dan subsistensi di Asia Tenggara*. Hasan Basari (Penerjemah). Jakarta: LP3ES.
- Setiawan, Bonnie. (2003). *Globalisasi pertanian: Ancaman atas kedaulatan bangsa dan kesejahteraan petani*. Jakarta: Institute for Global Justice.
- Soemardjan, Selo. (1984). *Land Reform di Indonesia; dalam Soediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi (Eds.)*. *Dua abad penguasaan tanah: Pola penguasaan tanah pertanian di Jawa dari masa ke masa*. Jakarta: Gramedia.

- Tjondronegoro, Prof. Dr. Sediono M.P. (2008). Negara agraris ingkari agraria: Pembangunan desa dan kemiskinan di Indonesia. Bandung, Indonesia: Yayasan Akatiga.
- Tuma, Elias. (1965). Twenty-six centuries of land reform. Berkeley: University of California Press.
- Wallerstein, Immanuel. (1974). The modern world system. New York: Academic Press.
- Wiradi, Gunawan. (1984). Landreform Indonesia. Dalam Sediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi (Ed.). Dua abad penguasaan tanah (pp. 103-106). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- _____. (2009). Metodologi studi agraria: Karya terpilih Gunawan Wiradi (Moh. Shohibuddin, Editor). Bogor: Sajogyo Institute.
- Wiyono, Palus. (2003). Neoliberalisme dalam sektor industri pangan; dalam Wibowo dan Wahono (Eds.). Neoliberalisme. Yogyakarta: Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas.
- World Bank. (1994). Indonesia land administration project, staff appraisal report. Washington: World Bank, Agriculture Operations Division, Country Development III, East Asia and Pacific Region.
- _____. (2004). Rural Development and Natural Resources Sector Unit East Asia and Pacific Regions, Report no. 28178-IND. Washington: World Bank, Rural Development and Natural Resources Sector Unit East Asia and Pacific Regions.